

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*), didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, dengan penandatanganan Deklarasi ASEAN (*Bangkok Declaration*) oleh Bapak Pendiri ASEAN atau yang disebut dengan ASEAN Developer, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Adapun kelima negara tersebut merupakan negara anggota ASEAN yang telah membuka sektor keuangannya secara global. Tujuan utama dibentuknya organisasi tersebut adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan stabilitas di tingkat regional, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan diantara anggotanya dengan damai. ([www.asean.org](http://www.asean.org)). Dengan ini Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand sebagai pelopor dalam hubungan luar negeri terkhusus di bagian negara-negara yang sekarang disebut ASEAN yakni negara yang memiliki pemahaman lebih dulu dalam politik luar negeri.

Asia merupakan benua terbesar di dunia dengan banyak negara di dalamnya. Banyaknya negara di Asia menimbulkan keanekaragaman yang kaya baik itu dari sisi budaya, politik, maupun ekonomi. Dari segi ekonomi variasi keanekaragaman bisa dilihat dalam dimensi regional. Menurut klasifikasi (World Bank, 2018) sebagian bagian besar negara di Asia Barat Daya termasuk dalam salah satu kategori berpenghasilan menengah, sebagian besar negara di Asia

Utara, Tengah, dan Selatan termasuk dalam kategori berpenghasilan rendah. Berbeda dengan ASEAN, wilayah Asia bagian timur merupakan bagian paling makmur. Terlepas dari perbedaan itu, sebagian besar negara di Asia masih tergolong negara berkembang.

Menurut World Population Ratio (2019) negara berkembang juga dikenal sebagai LMIC (Low and Middle Income Country) atau negara berpenghasilan rendah dan menengah. Negara ini kurang maju daripada negara-negara yang diklasifikasikan sebagai "Negara maju" tetapi negara-negara ini memiliki peringkat lebih tinggi daripada negara yang kurang berkembang secara ekonomi.

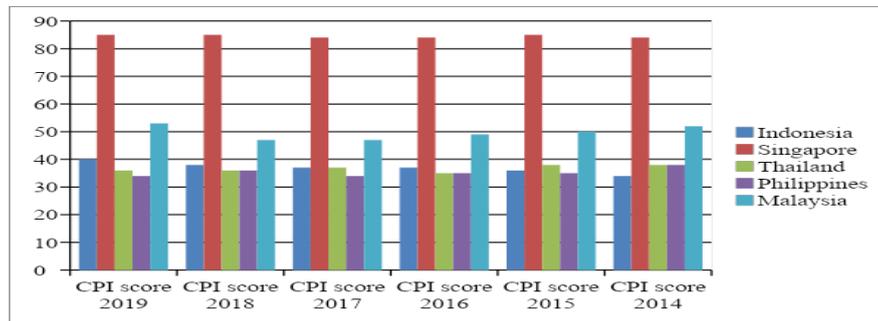
Fokus utama negara berkembang dalam pembangunan ekonomi adalah terciptanya masyarakat yang sejahtera yang dicerminkan dalam pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Menurut M.P. Todaro, pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai suatu proses dalam peningkatan tingkat pendapatan nasional yang dicirikan dengan adanya peningkatan kapasitas produksi suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator penting dalam melakukan analisis mengenai pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara.

Meier dan Baldwin (1957) menyatakan bahwa salah satu syarat yang diperlukan dalam pembangunan suatu negara adalah nilai dan lembaga-lembaga yang ada. Lembaga yang dimaksud adalah para pemangku kepentingan yang memiliki kekuasaan dalam mengatur kegiatan politik dan perekonomian suatu negara yaitu pemerintah. Menurut Meon dan Sekkat (2008) pemerintah yang memiliki kualitas yang buruk bisa menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi. Salah satu bukti dalam menunjukkan kualitas lembaga pemerintahan yakni dalam

mengatur keseimbangan negaranya dari korupsi, stabilitas politik, kebebasan ekonomi dan kestabilan jumlah penduduk yang memiliki tujuan pada pembangunan ekonomi.

Dalam laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Transparency International (2012) menyatakan korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang memiliki tujuan untuk keuntungan pribadi. Korupsi dapat bersifat besar, kecil dan politis, tergantung pada jumlah uang yang hilang dan pada sektor di mana korupsi itu terjadi. Blackburn, Bose dan Emranul Haque (2006) mengungkapkan bahwa korupsi dipandang sebagai salah satu penyebab pendapatan rendah dan memiliki efek besar dalam menimbulkan jebakan kemiskinan.

Hubungan korupsi dan pertumbuhan ekonomi masih menjadi perdebatan para ekonom, sejarawan dan ahli politik apakah korupsi membahayakan pertumbuhan ekonomi atau tidak. Terdapat dua pandangan mengenai korupsi yaitu “Grease of Wheels” dan “Sand of Wheels”. Korupsi dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian maka korupsi dikatakan sebagai Grease of Wheels, namun sebaliknya jika korupsi memberikan dampak negatif dan membahayakan perekonomian maka korupsi dikatakan sebagai Sand of Wheels. Maka sesuai data yang ada pada Transparency International lima negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand memiliki nilai yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Adapun dalam perkembangannya nilai persepsi anti korupsi (Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)/Corruption Perception Index (CPI)) merupakan ukuran yang umum dalam mendefinisikan keadaan persepsi suatu masyarakat terhadap praktik korupsi dalam kehidupan bernegara.



**Gambar 1.1 CPI di Lima Negara ASIAN Tahun 2014-2019**

*Sumber: Transparency International (2020)*

Transparency International dalam laporannya menyatakan bahwa indeks persepsi korupsi (CPI) di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand Memiliki keragaman. Setiap negara dinilai sudah mampu meningkatkan kinerja lembaga pemberantasan korupsi di negaranya. Hal ini bisa dilihat gambar di atas yang menyajikan data mengenai skor CPI lima negara di ASIAN pada tahun 2014 sampai 2019. Berdasarkan gambar tersebut, negara Singapura memiliki skor rata-rata CPI yang paling tinggi dibandingkan dengan negara lainnya yaitu sebesar 85. Negara Filipina memiliki skor rata-rata CPI yang paling rendah dibandingkan dengan negara lainnya yaitu sebesar 35.

**Tabel 1.1 CPI di Lima Negara ASIAN Tahun 2014 – 2019**

Negara	2019	2018	2017	2016	2015	2014	rata-rata
Indonesia	40	38	37	37	36	34	37
Singapura	85	85	84	84	85	84	85
Thailand	36	36	37	35	38	38	37
Filipina	34	36	34	35	35	38	35
Malaysia	53	47	47	49	50	52	50

*Sumber: Transparency International (2020)*

Tabel 1.1 menyajikan data mengenai skor CPI Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand enam tahun terakhir. Tabel tersebut

memperlihatkan bahwa lima negara di atas memiliki skor CPI yang bersifat fluktuatif. Dari lima negara di tersebut, rata-rata CPI lima tahun terakhir tertinggi dimiliki oleh negara Singapura sebesar 85 yang menunjukkan bahwa kasus korupsi lebih rendah dibandingkan lima negara lainnya. Disusul oleh Malaysia, Indonesia, dan Thailand dengan skor rata-rata masing-masing sebesar 50, 37, 37. dan yang paling rendah yakni Filipina skor rata-rata 35 masih memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Pada lima tahun terakhir rata-rata skor CPI di Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand masih rendah karena tidak ada yang mencapai skor 50.

Rendahnya skor CPI menggambarkan bahwa kasus korupsi masih marak terjadi di Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Hal ini tentu saja menjadi hal yang perlu diperhatikan dan perlu penanganan yang serius karena dapat mengakibatkan kekhawatiran jika tidak ada cara yang tepat untuk menanggulangnya. Korupsi akan merusak kualitas legitimasi politik dan institusi demokratik serta adanya ketidakefisienan dalam alokasi sumber daya akibatnya korupsi menjadi tantangan pembangunan yang serius (USAID, 2016).

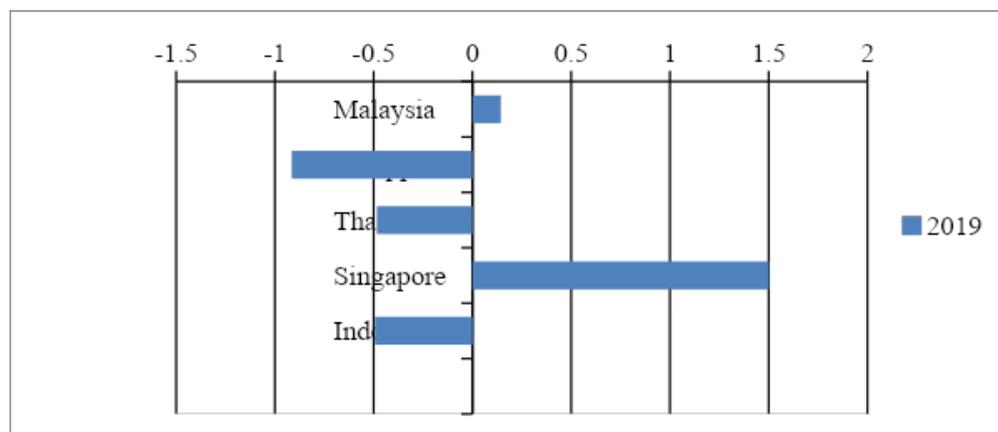
Selain korupsi, kualitas atau nilai institusi bisa dilihat dari stabilitas lembaga yang ada. Meier and Baldwin (1957) menyatakan bahwa salah satu syarat pembangunan adalah adanya stabilitas lembaga pemerintahan, dengan mengukur kualitas dari institusi yang ada di negara tersebut. Institusi dalam hal ini adalah pemerintah sebagai tokoh dalam proses politik. Powelson (2015) berpendapat bahwa kelemahan institusional menjadi inti dari pembangunan ekonomi yang lambat di negara-negara yang kurang berkembang. Lingkungan

kelembagaan merupakan hal yang penting dalam menentukan laju pertumbuhan ekonomi, serta lingkungan politik yang tidak stabil dapat menghambat pertumbuhan ekonomi negara berkembang (Mainwaring dan Scully, 1995).

Kegiatan ekonomi dan politik menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan karena di dalamnya terdapat pemerintah yang memiliki peran dalam merumuskan dan mengimplementasikan suatu kebijakan serta mengatur kegiatan perekonomian masyarakat yang mematuhi segala kebijakan yang ada (Kaufmann, Kraay, and Mastruzzi, 2003). Beberapa penelitian telah menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara ketidakstabilan politik dengan pertumbuhan ekonomi. Mekki Hamdaoui, Saif Eddine Ayouni, Samir Maktouf (2021) menemukan bahwa ketidakstabilan politik memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut World Bank (2014) definisi standar ketidakstabilan politik adalah kecenderungan keruntuhan pemerintah baik karena konflik atau kompetisi yang merajalela antar berbagai partai politik. Selain itu, terjadinya perubahan pemerintah meningkatkan kemungkinan perubahan selanjutnya. Ketidakstabilan politik cenderung persisten. Sebuah lembaga bernama Worldwide Governance Indicators (WGI) merangkum pandangan tentang kualitas tata kelola yang disediakan oleh sejumlah responden survei perusahaan, warga negara dan pakar di negara-negara industri dan berkembang. Data ini dikumpulkan dari sejumlah lembaga survei, organisasi non-pemerintah, organisasi internasional, dan perusahaan sektor swasta. WGI mengeluarkan data setiap tahun berupa indeks stabilitas politik di dua ratus lima belas negara di dunia. Indeks ini mengukur

persepsi tentang kemungkinan ketidakstabilan politik dan/atau kekerasan bermotivasi politik, termasuk terorisme. Indeks ini menggunakan skala -2,5 sampai 2,5, di mana -2,5 mengindikasikan suatu negara memiliki stabilitas politik yang buruk dan 2,5 mengindikasikan suatu negara memiliki stabilitas politik yang baik.



**Gambar 1.2 Indeks Stabilitas Politik di Lima Negara ASEAN Tahun 2019**

*Sumber: World Governance Indicators*

*World Governance Indicators* dalam laporannya menunjukkan bahwa negara Singapura memiliki skor indeks stabilitas politik yang paling tinggi pada tahun 2019 dibandingkan dengan negara lainnya yaitu sebesar 1,50 artinya bahwa tata kelola pemerintahan di negara Singapura cukup baik. Negara Filipina memiliki skor indeks stabilitas politik yang paling rendah pada tahun 2019 dibandingkan dengan negara lainnya yaitu sebesar -1,02 artinya tata kelola pemerintahan negara Filipina sangat buruk dan banyaknya kejadian terorisme yang mengganggu jalannya proses pemerintahan. Selain itu, gambar 1.2 tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia, Filipina, dan Thailand ini masih memiliki skor indeks stabilitas politik yang bernilai negatif artinya hal ini menunjukkan bahwa

negara tersebut memiliki kualitas pemerintahan yang kurang baik.

**Tabel 1.2 Stabilitas Politik di Lima Negara ASEAN Tahun 2014-2019**

<b>Negara</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Rata-Rata</b>
Indonesia	30	24	32	29	26	27	28.41
Malaysia	52	50	47	49	47	53	49.67
Philippines	38	35	34	35	36	34	35.33
Thailand	38	38	37	35	36	36	36.67
Singapura	84	85	84	84	85	85	84.50

*Sumber: Worldwide Governance Indicator (2020)*

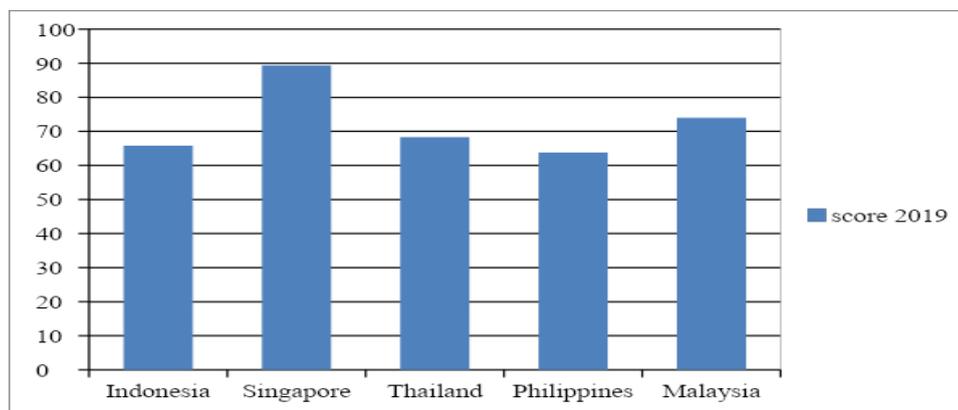
World Governance Indicators dalam laporannya menunjukkan bahwa sejak tahun 2014 sampai 2019, negara Singapura memiliki skor indeks stabilitas politik dengan rata-rata sebesar 84,50 dan diikuti oleh Malaysia dengan rata-rata sebesar 49,67 dengan ini dua negara tersebut memiliki nilai rata-rata yang positif artinya bahwa tata kelola pemerintahan di negara Singapura dan Malaysia pada enam tahun terakhir yakni 2014 sampai 2019 cukup baik. Negara Filipina memiliki skor indeks stabilitas politik dengan rata-rata sebesar 35,33 diikuti oleh Thailand dan Indonesia dengan nilai rata-rata sebesar 36,67 dan 28,41 artinya dari data tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia, Filipina, dan Thailand ini masih memiliki skor indeks stabilitas politik di bawah 50 artinya hal ini menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki kualitas pemerintahan yang kurang baik. Selain stabilitas politik, variabel lain yang dapat menjelaskan mengenai fenomena dalam ekonomi politik adalah *economic freedom*. *Economic freedom* adalah hak fundamental setiap manusia untuk mengontrol usaha dan properti mereka sendiri. Dalam masyarakat ekonomi bebas, setiap individu bebas untuk bekerja, memproduksi dan berinvestasi sesuai keinginan mereka.

Sejak 1995, The Heritage Foundation dan Wall Street Journal membuat

*index of economic freedom*. *Economic freedom* didefinisikan sebagai “tidak adanya pemaksaan atau pembatasan yang dilakukan pemerintah terhadap produksi, distribusi atau konsumsi barang dan jasa di luar batas yang diperlukan bagi warga negara untuk melindungi dan menjaga kebebasan itu sendiri.” Dengan kata lain, masyarakat bebas untuk bekerja, memproduksi, mengkonsumsi dan berinvestasi dengan cara yang mereka anggap paling efektif. (Bech & Miles, 2006).

The Heritage Foundation adalah sebuah badan ahli yang memberikan saran dan ide mengenai masalah politik atau ekonomi dengan berprinsip pada perdagangan bebas, kebebasan individu, nilai luhur tradisional Amerika, serta pertahanan negara yang kuat. Selama hampir lima puluh tahun, The Heritage Foundation telah memajukan prinsip-prinsip perusahaan bebas, pemerintahan terbatas, kebebasan individu, nilai-nilai tradisional Amerika, dan pertahanan nasional yang kuat. Kami telah memimpin reformasi di setiap bidang kebijakan mulai dari pajak dan regulasi hingga kejahatan dan pertahanan negara.

Sen (2000) seorang pemenang hadiah Nobel dalam bidang ekonomi dimana dia telah membuat kontribusi yang dapat diperhitungkan dalam pembangunan ekonomi dia pernah berkata bahwa “pembangunan terdiri dari penghapusan variasi tipe ketidakbebasan yang meninggalkan seseorang dengan pilihan yang terbatas dan kecilnya peluang untuk melatih warisan yang beralasan”.



**Gambar 1.3 Indeks Kebebasan Ekonomi di Lima Negara ASEAN Tahun 2019**

*Sumber: Heritage Foundation (2020)*

Heritage Foundation dalam laporannya menunjukkan indeks Economic Freedom yang mana negara singapura memiliki skor yang paling tinggi pada tahun 2019 dibandingkan dengan negara lainnya yaitu sebesar 89,4 diikuti oleh negara Malaysia memiliki skor indeks ekonomi freedom pada tahun 2019 yaitu sebesar 74 setelah itu ada Thailand yang memiliki indeks ekonomi freedom sebesar 68,3 dan indonesia memiliki angka ekonomi freedom tidak jauh berbeda dengan Thailand yaitu sebesar 65,8 dan negara paling rendah di antara lima negara ini yaitu Filipina dengan indeks ekonomi freedom sebesar 63,8.

**Tabel 1.3 Indeks Kebebasan Ekonomi di Lima negara ASEAN Tahun 2014-2019**

Negara	2014	2015	2016	2017	2018	2019	rata-rata
Indonesia	58,5	58,1	59,4	61,9	64,2	65,8	61,3
Singapura	89,4	89,4	87,8	88,6	88,8	89,4	88,9
Thailand	63,3	62,4	63,9	66,2	67,1	68,3	65,2
Filipina	60,1	62,2	63,1	65,6	65,0	63,8	63,3
Malaysia	69,6	70,8	71,5	73,8	74,5	74,0	72,4

*Sumber: heritage foundation*

Heritage Foundation dalam laporannya menunjukkan bahwa indeks Economic Freedom dari tahun 2014 sampai 2019. Berdasarkan data tersebut,

negara Singapura memiliki skor indeks stabilitas politik dengan rata-rata sebesar 88,9 dan diikuti oleh Malaysia dengan rata-rata sebesar 74 dengan ini dua negara tersebut memiliki nilai rata-rata tertinggi dari negara yang lain. Negara Thailand memiliki skor indeks stabilitas politik dengan rata-rata sebesar 68,3 diikuti oleh Indonesia dan Filipina dengan nilai rata-rata sebesar 65,8 dan 63,8 artinya dari data tersebut memperlihatkan bahwa indeks Economic Freedom berpengaruh terhadap kemajuan suatu negara dilihat Singapura dengan negara maju memiliki indeks Economic Freedom yang tinggi

Selain dari kebebasan ekonomi, pertumbuhan penduduk dan Adam Smith berpendapat bahwa jumlah penduduk merupakan salah satu faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia yaitu jumlah penduduk merupakan faktor penting di mana proses pertumbuhan output memerlukan adanya tenaga kerja yang berasal dari masyarakat. Namun, menurut David Ricardo adanya pertumbuhan penduduk secara terus menerus akan menyebabkan berlakunya *the law of diminishing return*, artinya bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan berlaku terus menerus karena semakin bertambahnya penduduk akan menyebabkan produksi marginal akan berkurang sehingga pendapatan nasional akan semakin mengalami perlambatan pertumbuhan, karena adanya tingkat penduduk yang tinggi akan menyebabkan upah menurun, sehingga menurunkan keuntungan dan menaikkan sewa tanah.

Dalam kajian empiris yang dilakukan oleh Windy Ayu Astuti, Muhammad Hidayat, Ranti Darwin (2017) menemukan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini didasari oleh variabel

pertumbuhan penduduk mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pelalawan dengan probabilitas variabel pertumbuhan penduduk sebesar 0,04 lebih kecil dari taraf nyata lima persen. Nilai koefisien variabel pertumbuhan penduduk adalah sebesar negatif 1.73E-05 yang artinya jika pertumbuhan penduduk mengalami kenaikan 1 jiwa maka pertumbuhan ekonomi akan menurun sebesar 1.73E-05 persen. Hal ini sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 1.4 Pertumbuhan Penduduk di Lima Negara ASEAN Tahun 2014-2019**

<b>Negara</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>rata-rata</b>
Indonesia	1,31	1,26	1,22	1,17	1,13	1,09	1,20
Singapura	1,29	1,18	1,29	0,08	0,46	1,14	0,91
Thailand	0,43	0,40	0,37	0,34	0,31	0,28	0,35
Filipina	1,64	1,57	1,50	1,44	1,39	1,36	1,48
Malaysia	1,34	1,34	1,35	1,35	1,35	1,32	1,34

*Sumber: World Bank*

World Bank dalam laporannya menunjukkan data pertumbuhan penduduk dari tahun 2014 sampai 2019. Berdasarkan data tersebut, negara singapura memiliki skor pertumbuhan penduduk dengan rata-rata sebesar 1,48 persen dan memiliki penurunan di setiap tahunnya dan diikuti oleh Malaysia dengan rata-rata sebesar 1,34 persen dan mengalami kenaikan dari 2014 sampai 2017 dan di 2018 sampai 2019 mengalami penurunan, setelah dari Malaysia ada Indonesia dengan rata-rata sebesar 1,20 persen dengan nilai ini Indonesia terlihat mengalami penurunan di setiap tahunnya dengan hasil akhir di 2019 yakni dengan nilai 1,09 persen. Data di negara Singapura dan Thailand memiliki rata-rata sebesar 0,91 persen dan 0,35 persen dan dua negara ini mengalami penurunan di setiap tahun.

Berdasarkan fenomena dan urgensi serta belum ada yang meneliti dalam hubungan variabel yang terdapat dalam judul ini, maka penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Stabilitas Politik, Korupsi, Indeks Kebebasan Ekonomi dan Pertumbuhan Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN-5 Tahun 2014-2019”**.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh stabilitas politik, korupsi, kebebasan ekonomi, dan pertumbuhan penduduk secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN-5 tahun 2014-2019?
2. Bagaimana pengaruh stabilitas politik, korupsi, kebebasan ekonomi, dan pertumbuhan penduduk secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh stabilitas politik, korupsi, indeks kebebasan ekonomi dan pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN-5 tahun 2014-2019, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh stabilitas politik, korupsi, kebebasan ekonomi dan pertumbuhan penduduk secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN-5 tahun 2014-2019.
2. Mengetahui pengaruh stabilitas politik, korupsi, kebebasan ekonomi, dan

pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan teori dan ilmu pengetahuan teoritis terkait dengan ilmu ekonomi makro yaitu faktor-faktor politik yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
2. Penelitian akan memberikan informasi mengenai faktor-faktor politik yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
3. Hasil penelitian ini bisa digunakan untuk referensi dan sumber informasi bagi penelitian selanjutnya.
4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pada faktor-faktor politik yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

#### **1.1 Kegunaan Hasil Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- a. Bagi pemerintah
  - 1) Memberikan masukan kebijakan mengenai pengaruh stabilitas politik, korupsi, indeks kebebasan ekonomi dan pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN-5 tahun 2014-2019.
  - 2) Memberikan masukan kebijakan dari interpretasi pengaruh stabilitas politik, korupsi, indeks kebebasan ekonomi dan pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN-5 tahun 2014-2019.

3) Memberikan masukan kebijakan kepada pemerintah terhadap urgensi dari stabilitas politik, korupsi, indeks kebebasan ekonomi dan pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN-5 tahun 2014-2019.

b. Bagi akademisi

1) Menghasilkan penelitian yang dapat menjelaskan pengaruh stabilitas politik, korupsi, indeks kebebasan ekonomi dan pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN-5 tahun 2014-2019.

2) Menghasilkan penelitian yang dapat menjelaskan hasil pengaruh stabilitas politik, korupsi, indeks kebebasan ekonomi dan pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN-5 tahun 2014-2019.

c. Bagi pembaca

1) Menghadirkan penjelasan untuk hubungan pengaruh stabilitas politik, korupsi, indeks kebebasan ekonomi dan pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN-5 tahun 2014-2019.

2) Menghadirkan penjelasan untuk menjelaskan hasil pengaruh stabilitas politik, korupsi, indeks kebebasan ekonomi dan pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN-5 tahun 2014-2019.

a. Kegunaan teoritis

1) Hal baru *novelty* dalam penelitian ini adalah indeks kebebasan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN-5 tahun 2014-2019

- 2) Melihat hubungan antara stabilitas politik, korupsi, indeks kebebasan ekonomi dan pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN-5 tahun 2014-2019, memiliki *novelty* dalam hubungan tersebut

## **Lokasi dan Jadwal Penelitian**

### **1.5.1. Lokasi Penelitian**

Dalam melakukan kegiatan penelitian ilmiah, penulis terlebih dahulu menentukan lokasi penelitian, hal ini diperlukan dalam rangka memperoleh informasi data yang dibutuhkan sebagai dasar acuan bagi penulis untuk menetapkan, menjabarkan, merumuskan permasalahan kemudian untuk ditarik kesimpulan. Penelitian ini berlokasi di lima negara Asia Tenggara meliputi Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina dan Singapura. Lokasi penelitian dilakukan di kota Tasik Malaya melalui pengambilan data sekunder pada World Bank Development Indicator, World Governance Indicator, Transparency International dan Heritage Foundation yang menyajikan data mengenai pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, indeks persepsi korupsi dan kebebasan ekonomi.

### **1.5.2. Jadwal Penelitian**

Penelitian ini direncanakan akan dimulai pada bulan September 2021 dengan melakukan pengajuan judul. Selanjutnya pada tahap sidang kepada pihak Program Studi Ekonomi Pembangunan ditargetkan akan diselesaikan pada bulan Januari 2022. Adapun penyusunan skripsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan secara interaktif oleh penulis, dosen pembimbing dan selanjutnya setelah seminar usulan penelitian dilibatkan pula pihak dosen penguji. Adapun matriks jadwal

penelitian adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.5 Jadwal Penelitian**

Keterangan	Tahun 2021-2022																						
	Sep	Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret	
	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)
Pengajuan Judul	■	■																					
Pembuatan Usulan Penelitian			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
Seminar Usulan Penelitian											■												
Revisi Usulan Penelitian							■	■				■	■	■									
Pengumpulan Data			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
Analisis Data													■	■	■	■							
Penyusunan Skripsi													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sidang Skripsi																						■	■

Keterangan: Sep = September